

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam eksistensi negara modern, dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha membangun sistem hukum sendiri. Secara teoritis-konseptual, dalam kehidupan sebuah negara yang berdaulat, berbagai karakteristik kebangsaan secara historis, sosio kultural dan ideologi serta politik, akan selalu melekat erat dan mewarnai karakter sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks keindonesiaan, karakteristik kebangsaan Indonesia yang berbhineka tunggal ika, merupakan pula karakter dari sistem hukum Indonesia.¹

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:²”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Serta tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi:³ ”Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaate)”. Dan “Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”

¹ Natangsa Surbakti. 2001. *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 9.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat

³ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kaitannya dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, maka diusahakan agar pembangunan tersebut mencakup aspek-aspek materiil dan spiritual dari kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang-bidang karya, cipta, dan rasa. Selain itu, pembangunan juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bidang hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian, keutuhan, serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan integrasi melalui hukum merupakan unsur yang esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir, sebab negara merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memenuhi cita-cita tersebut. Adanya pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat Indonesia seluruhnya. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.⁴

Pemerintah menciptakan perubahan dalam masyarakat, yaitu berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang apa adanya. Salah satunya alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah “hukum pidana”. Berdasarkan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah

⁴ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika. Hal. 3

berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru dan semakin leluasa pula. Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Dengan hukum pidana, pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya.⁵

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:⁶ pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan”.⁷ Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.⁸

Di Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan terjadi diskriminasi terhadap tahanan. Peristiwa seperti ini sudah lama terjadi di

⁵ Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Aksara Baru: Jakarta. Hal. 10.

⁶ KUHP Pasal 10.

⁷ Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 14.

⁸ Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hal.44.

seluruh Indonesia, hanya baru diributkan pada saat ini. Satgas mafia peradilan yang dibentuk pemerintah melakukan sidak ke Rutan Pondok Bambu dan mendapatkan adanya tahanan yang diistimewakan, yaitu Artalyta Suryani alias Ayin tahanan kasus suap.

Apabila tersangka sudah masuk ke kantor polisi apalagi berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan menjadi terdakwa, di situ sudah terjadi tawar menawar harga kamar dan fasilitas yang ada di Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan itu ada tempat yang bagus dan yang tidak. Jadi para tahanan bisa memilih tempat sesuai kemampuan materinya. Nego kamar ini dilakukan oleh koordinator-koordinator kamar atau istilahnya Kepala kamar (Palkam), yang umumnya adalah geng-geng tahanan. Kepala kamar yang menentukan kamar untuk orang berduit dan yang tidak berduit, kamar-kamar istimewa itu ditawarkan langsung oleh Palkam kepada tahanan, sehingga setiap tahanan seolah-olah diperlakukan seperti dagang sapi mana yang gemuk dan mana yang kurus. Pembinaan dan pendidikan yang ada di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia belum memenuhi persyaratan yang layak, karena banyak sekali diskriminasi yang terjadi. Padahal tujuan dan program yang ada di Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Departemen Hukum dan HAM seharusnya tidak hanya melihat dari kondisi yang ada di Rutan Pondok Bambu saja, tapi juga harus mensterilkan seluruh Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di

Indonesia dari diskriminasi tahanan dan praktek dagang sapi atau jual beli fasilitas mewah.⁹

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina narapidana.¹⁰

Pembinaan kepada warga binaan (narapidana) di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) negara tidak akan berjalan baik jika lapas/rutan tidak tertib. Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta mengemukakan, masalah kelebihan kapasitas yang dialami hampir seluruh lapas/rutan di Indonesia mengakibatkan suasana yang padat (*crowded*), sehingga proses pembinaan tidak berjalan dengan baik.¹¹

Kelebihan kapasitas yang dialami lapas/rutan menjadi penyebab tidak optimalnya proses pembinaan kepada para narapidana. Saat ini jumlah narapidana/tahanan sekitar 140 ribu, sedangkan daya tampung lapas/rutan hanya sekitar 80 ribu orang. Dengan program percepatan pembinaan (remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat), telah dibebaskan sebanyak 13 ribu narapidana (tahun 2007). Pada triwulan tahun 2008 telah dibebaskan sebanyak 4.000 narapidana. Salah satu program andalan

⁹Putra Kaban. Tahanan Rutan dan LP Diperlakukan Seperti “Dagang Sapi”. Jurnal. <http://beritasore.com/2010/01/14/putra-kaban-tahanan-rutan-dan-lp-diperlakukan-seperti-%E2%80%98dagang-sapi%E2%80%99/> Download Kamis 22 April 2010 11:33

¹⁰Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal.97-98.

¹¹Hukumham info. Pembinaan Napi bisa Berjalan kalau Lapas/Rutan Tertib. Article. <http://hukumham.info/info-pers-beritamenu-43/635-pembinaan-napi-bisa-berjalan-kalau-lapasrutan-tertib.html> Download Kamis 22 April 2010 12:45

pemasyarakatan untuk meningkatkan kinerjanya adalah Bulan Tertib Pemasyarakatan (buterpas) yang dicanangkan Andi Mattalatta pada 14 Februari 2008 lalu di Rutan Salemba Jakarta. Salah satu programnya adalah pengoptimalan pembinaan, sehingga bisa mempercepat proses pembinaan narapidana di dalam lapas. Narapidana yang dalam proses pembinaannya bagus dan menunjukkan perubahan sikap yang signifikan bisa mendapat pengurangan masa hukuman. “Harus ada program-program cerdas lain, salah satunya meningkatkan pembinaan kepada narapidana. Walaupun dengan keterbatasan terutama anggaran, Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Pemasyarakatan terus menggulirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan, di antaranya pembangunan fisik dan percepatan proses pembinaan narapidana melalui mekanisme remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Lahirnya Sistem Pemasyarakatan pada 27 April 1964 merupakan suatu momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sistem ini memberikan makna bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tapi juga merupakan suatu upaya re-integrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Lahirnya sistem pemasyarakatan merupakan salah satu media untuk mengevaluasi dan merefleksikan hakikat yang terkandung pada pelaksanaan Buterpas. Program ini adalah untuk membangun komitmen tinggi dan integritas moral yang kuat bagi pemasyarakatan.¹²

¹²Administrator Hukum HAM. Menuju Keseimbangan Komposisi Lapas/Rutan. Article. http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=885&Itemid=54 Download Kamis 22 April 2010 11:50

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan azas:¹³

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelajaran;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan; orang-orang tertentu.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Begitu pentingnya fungsi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan

¹³ Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menyusunnya dalam skripsi dengan judul: **FUNGSI RUMAH TAHANAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA.**

B. Rumusan Masalah

Sebelum menginjak pada perumusan masalah, penulis akan menguraikan tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan atau rencana dengan pelaksanaan.¹⁴

Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana fungsi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan pelaku tindak pidana dilihat dari aspek, antara lain:
 - a. Dasar peraturan?
 - b. Program pembinaan?
 - c. Metode pembinaan?
 - d. Pelaksanaan pembinaan?
2. Kendala normatif dan empiris apa saja yang dilakukan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan pelaku tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalla Indonesia.

Tujuan penelitian tersebut antara lain:

1. Tujuan obyektif:
 - a. Mengetahui karakteristik Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Mengetahui metode dan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan dan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tujuan Subyektif:
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek.
 - c. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapny sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan dan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka pemikiran

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang

sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

Efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenangan di luar hukum.¹⁶ Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

¹⁵ Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 3.

¹⁶ Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 82-83.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁷

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (Rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya.

Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*). Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.¹⁸

Permasalahan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang paling pertama adalah kemampuan petugas dalam mengelola persoalan yang terjadi di unit pelaksanaan teknis. Over kapasitas memang menjadi masalah utama terhambatnya proses pembinaan. Pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas karena menampung tahanan, sehingga mengalami stagnasi dalam proses pembinaan. Jadi diperlukan petugas untuk mampu mengatasi masalah pengelolaan, perencanaan dalam melaksanakan pembinaan. Dalam rangka memperkaya pola pembinaan, sepatutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dibekali pengetahuan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang

¹⁸Jakarta Narkotic Prison. Pembinaan Bagi Tahanan dan Napi. Kliping.
http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=50 Download
kamis 22 April 2010 12.00

memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁹

Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (D.P.P) memegang peranan utama untuk disertai tugas melakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan selama narapidana di dalam lembaga ataupun di luar lembaga, sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 dan Surat Edaran Dirjen. B. T. W. No. DDP. 2.2/10/5 tanggal 5 April 1970 jo. Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP. 10.13./3/1 tanggal 8 Februari 1965.

Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 itu menentukan susunan Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan. Sejak berlakunya Keputusan Presiden tersebut, mulailah pemasyarakatan bertugas ganda yang tidak dapat dibatasi dan dibedakan secara terpisah antara tugas pembinaan dan tugas bimbingan. Pembinaan didalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan diluar lembaga, namun dalam praktek pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas kurang.²⁰

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dinyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan

¹⁹ Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Hal. 143.

²⁰ Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty. Hal. 188-190.

Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan:²¹

- a. Pembinaan kepribadian, diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya.
- b. Bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- c. Pembinaan kemandirian, diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali, berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut²². Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian²³. Maka di dalam suatu penelitian agar terlaksana dengan maksimal perlu menggunakan metode yang tepat, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku mengenai kebijakan hukum pidana dan mengkaji data primer dalam masyarakat serta mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada. Metode penelitian

²¹ UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²² Soerjono Soekamto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. Hal. 3.

²³ Noeng Muhadjir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 3.

yuridis yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan, misalnya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan empirisnya yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya melihat secara langsung bentuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dua hal atau lebih sub sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berlaku secara lintas dengan berbagai sistematika dengan membandingkan kedua sub sistem tersebut maka dapat ditemukan unsur-unsur persamaan serta perbedaan kedua sistem tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.²⁴ Penelitian hukum ini bermaksud untuk mendiskripsikan komparasi tentang fungsi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sragen di Jawa Tengah. Peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan pembinaan pelaku tindak

²⁴ Soerjono Soekamto. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 12.

pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sragen

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dari sejumlah keterangan atau fakta tentang pembinaan pelaku tindak pidana yang secara langsung diperoleh di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, baik dari petugas yang melakukan pembinaan atau pelaku tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan dan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginterventarisasikan, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu informan diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga informan tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga memberikan keterangan secara bebas. Wawancara dilakukan terhadap petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang di bina Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen untuk mendapatkan data tentang komparasi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan dan di Lembaga Pemasyarakatan.

6. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, maksudnya penulis akan mengkomparasikan atau membandingkan fungsi Rumah Tahanan dengan fungsi Lembaga

Pemasyarakatan dalam pembinaan pelaku tindak pidana secara normatif dan empiris.

F. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum tentang pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan dan tinjauan umum tentang pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai fungsi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan pelaku tindak pidana dilihat dari aspek, antara lain: dasar peraturan, program pembinaan, metode pembinaan serta kendala normatif dan empiris Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.